

Rasionalitas Dalam Ekonomi Islam (Asumsi-Asumsi yang Berkembang)

Oleh : Gusnam Haris

Dosen Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Email: ghahusta@gmail.com

Abstrak

Salah satu pilar paradigma ekonomi konvensional adalah "rational economic man". Pilar ini dibangun dari filosofi yang berbeda dengan filosofi ekonomi Islam. Perbedaan filosofi ini membuat perilaku ekonomi manusia yang rasional dalam ekonomi Islam berbeda dengan perilaku ekonomi rasional dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, membawa manusia bersama-sama saling menyayangi, bekerjasama, persaudaraan, dan altruisme (berjuang untuk orang lain yang kadangkala merugikan diri sendiri) adalah menjadi bagian dari perilaku ekonomi muslim yang dipandang rasional. Bukanlah perilaku bagaimana memenuhi kepentingan diri sendiri dengan cara memaksimalkan kekayaan dan konsumsi lewat cara apapun, seperti ekonomi konvensional, yang dipandang manusia rasional. Rasionalitas dalam ekonomi Islam tersebut berkembang terus dan berangkat dari dasar utama agama itu sendiri yaitu "tauhid".

Key word: rasionalitas, ekonomi Islam.

A. Pendahuluan

Terminologi rasionalitas merupakan terminologi yang sangat longgar. Argumentasi apapun yang dibangun selama hal tersebut memenuhi kaidah-kaidah logika yang ada, dan oleh karenanya dapat diterima akal, maka hal itu dapat dikatakan sebagai bagian dari ekspresi rasionalitas. Pada

awalnya mengacu kepada beberapa perangkat aksioma¹, kemudian masuk proses maksimisasi. Proses maksimisasi itu menjadi latihan teknis semata-mata setelah mengetahui peta pemanfaatannya. Hal yang menentukan nantinya terkait dengan bentuk dan berbagai dimensi peta itu sendiri, yang secara etik dan kultural ditentukan dan berbeda dalam berbagai bidang kehidupan. Dari sinilah, bermacam-macam rasionalisasi watak yang paling bervariasi ada dalam berbagai bagian kehidupan dan dalam semua bidang budaya, termasuk ekonomi.²

Teori perilaku konsumen yang dikembangkan di Barat setelah timbulnya kapitalis merupakan dualitas, yakni “rasionalisme dan utilitarianisme.” Teori ini mempertimbangkan maksimisasi pemanfaatan sebagai tujuan konsumen yang dipostulasikan. Pemanfaatan yang dimaksimisasikan adalah pemanfaatan “*homo-economicus*” yang tujuan tunggalnya adalah mendapatkan kepuasan ekonomik pada tingkatan tertinggi dan dorongan satu-satunya adalah “kesadaran akan uang.”³

Dalam kajian ilmu ekonomi Islam konsep-konsep tersebut tentu tidak bisa langsung diterima apa adanya, karena ruh yang memberikan spirit terhadap ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional. Contohnya konsep kebutuhan

1 Aksioma adalah kaidah yang diterima secara universal dan tidak perlu lagi dilakukan penelitian dan pengujian untuk membuktikan kebenarannya. *Teks Book Ekonomi Islam*. Direktorat Perbankan Syariah (DPbS) Bank Indonesia dan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi (P3EI-UII) Universitas Islam Indonesia, 2007, hlm. 19.

2 Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, cet. ke-1, alih bahasa Mahnun Husein, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 16.

3 *Ibid.* hlm 17.

(*wants*) dalam ekonomi konvensional harus dibandingkan dengan konsep *dharuryah*, *hajjiyah*, dan *kamaliyah* dalam ushul fiqih. Klaim ekonomi konvensional bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas, perlu dipertanyakan lagi dalam ekonomi Islam karena adanya perbedaan konsep, ada term *tama'* dan *qanaah* dalam akhlak Islam. Mendasari pemikiran ini adalah; apakah konsep tersebut sudah sampai derajat *ilmu* atau masih dalam derajat *zann* yang tentunya masih butuh banyak perdebatan. Di samping sisi keilmuan, dari sisi pelaksanaan, penerapan ekonomi konvensional mestinya juga dibandingkan dengan standar *amaliyah Islam*. Sebagai contoh, penerapan praktek riba, sekalipun disokong oleh berbagai teori tentang *interes*, jelas tidak bisa masuk begitu saja dalam praktek *amaliyah Islam*.

Makalah singkat ini berusaha melihat rasionalitas dalam ekonomi Islam. Untuk melihat ini lebih jauh, sebelumnya akan diutarakan terlebih dahulu bagaimana rasionalitas dalam ekonomi konvensional. Uraian tentang rasionalitas dalam ekonomi Islam, akan dilengkapi terlebih dahulu dengan dasar-dasar dan prinsip atau karakter ekonomi Islam yang menjadi pijakan dari rasionalitas Islam. Dan terakhir dilihat pengaruhnya dalam perilaku konsumen Islam, seperti apa perilaku konsumen yang rasional.

B. Rasionalitas Dalam Ekonomi Konvensional

Asumsi sentral dalam teori ekonomi mikro neoklasik adalah manusia berperilaku secara rasional. Asumsi ini diperlakukan agar dapat dibangun teori yang memiliki daya prediksi terhadap perilaku manusia dalam memenuhi

kebutuhannya, dihadapkan dengan keterbatasan sumber daya yang dimilikinya. Rasionalitas harus disamakan dengan pemenuhan kepentingan diri sendiri, dan dorongan kepentingan diri dalam diri manusia sebagai moral yang setara dengan dorongan gaya grafitasi di bumi.⁴ Dalam kerangka ini masyarakat hanya dipandang sebagai kumpulan individu yang disatukan oleh kepentingan diri.

Rasionalitas menjadi dasar dari semua model dalam teori ekonomi moderen yang berkembang sampai saat ini, dan diyakini bahwa sistem kapitalisme yang ada tidak akan dapat hidup tanpanya. Meskipun pada kenyataannya manusia sering kali bertindak tidak rasional,-misalnya seseorang memberikan tips kepada pelayan restoran atas pelayanan yang diberikan-, tetapi teori ekonomi memperlakukan manusia sebagai orang yang senantiasa rasional. Dengan demikian, perbedaan rasionalitas dalam teori dengan rasionalitas dalam kenyataan seringkali kabur.⁵ Namun tidak bisa secara serta merta dibuang karena akan membawa kepada hal yang lebih kabur lagi.

Rasionalisme ekonomik menafsirkan perilaku manusia sebagai sesuatu yang dilandasi dengan perhitungan cermat, yang diarahkan dengan pandangan ke depan dan

4 M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2002), hlm. 19. Juga dalam Milton L. Myers, *The Soul of Modern Economic Man: Ideas of Self Interest, Thomas Hobes to Adam Smith*, (1983), hlm. 2.

5 Richard B. McKenzie, *The Limit of Economic Science*, Kluwer: Nijhoff Publishing, 1983, melalui Mustafa Edwin Nasution, *et al. Pengenalan Ekstusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 59. Lihat juga Syed Omar Syed Aqil, "Rationality in Economic Theory: A Critical Appraisal" dalam Sayyid Tahir dkk. (ed.), *Reading in Micro Economics: An Islamic Perspective*, (Longman, Malaysia, 1992), hlm. 31.

persiapan terhadap keberhasilan ekonomik. Keberhasilan ekonomik secara ketat didefenisikan sebagai membuat uang dari manusia. Memperoleh harta baik dalam pengertian uang atau berbagai komoditas adalah tujuan hidup yang terakhir dan pada saat yang sama merupakan tongkat pengukur keberhasilan ekonomik.⁶

Keberhasilan dalam membuat uang adalah hasil dari ekspresi kebaikan dan keahlian. Paham utilitas (*Utilitarianisme*)⁷ adalah sumber dari nilai-nilai dan sikap-sikap moral. Kejujuran berguna karena ia menjamin kepercayaan; demikian juga ketepatan waktu, ketekunan bekerja, dan sikap hemat, semua dipandang bagus karena akan lebih mendukung keberhasilan membuat uang.

Dasar-dasar di ataslah yang membangun rasionalitas ekonomi konvensional. Secara detail Syed Agil, setelah menyadur dari berbagai literatur, menggambarkan bahwa agen-agen ekonomi dikatakan rasional ketika mengikuti pengertian-pengertian berikut:

1. *People know what they want, are able to order their wants from most preferred to least preferred, and are able to act consistently. The individuals satisfy a basic set of postulates which characterize rational behaviour.*
2. *Both the ends and the means of an activity break with tradition and are based on reasoning..*
3. *It should lead towards the quantification of ends and means in monetary units. This quantification in turn leads to calculation and the tendency to maximize the aim of*

⁶ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam ...*, hlm. 16.

⁷ Utilitarianisme menyatakan bahwa yang baik adalah yang berguna (utility=kegunaan), ini merupakan perkembangan dari hedonisme. Yang menentukan nilai perbuatan adalah jumlah kenikmatan dikurangi jumlah penderitaan itulah hasil perbuatan. Jadi mesti dihitung lebih dahulu banyak mana kenikmatan atau penderitaan yang terdapat dalam suatu perbuatan. Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum: Akal dan Hati Sejak Thales sampai James*, cet ke-7, (Bandung: Rosda Karya, 1999), hlm. 36.

- activity, e.g. profit where more is preferred to less.
4. *In the capitalist mode of production, rationality means the satisfaction of the principle of greatest efficiency and economy of means. There is no room for sentiment or for traditional values not quantified in money, nor for traditional slackness in gainful activity.*
 5. *Individual rational behavior in pursuing the satisfaction of self-interest will lead to social good.*
 6. *A person's choices are 'rational' if and only if these choices can all be explained in terms of some preference relation consistent with the revealed preference, i.e. if his choices can be explained as the choosing of most preferred alternatives with respect to a postulated preference relation.⁸*

Singkat kata yang dikatakan rasional dalam ekonomi konvensional adalah individual atau semakna *self-interest*.

Dalam banyak hal, rasionalitas seringkali mamaksa adanya penyederhanaan-penyederhanaan masalah, yang kemudian direkayasa menjadi suatu model. Model adalah penyederhanaan masalah-masalah ekonomi dengan tujuan agar kita dapat memahami, melakukan prediksi, merancang kebijakan. Begitu banyak asumsi yang tidak realistis di dalam sebuah model sehingga sebuah tingkat kesalahan tertentu merupakan sesuatu yang tidak terelakkan. Adanya rasa maklum atas kesalahan yang berada di luar jangkauan rasional menunjukkan bahwa masyarakat ilmiah moderen meyakini keterbatasan rasionalitas. Dengan demikian perlu dipercaya bahwa ada sesuatu yang tidak terjangkau oleh rasio, karena keterbatasan pengetahuan, metode, maupun keterbatasan nalar. Hal itulah yang dikenal dengan *beyond rationality*. Memaklumi adanya sesuatu yang di luar nalar bukan berarti tidak rasional. *Beyond rationality* tidak sama dan tidak identik

32. ⁸ Syed Omar Syed Aqil, "Rationality in Economic Theory:....", hlm.

dengan *irrationality*.⁹

Sebagai contoh mengeluarkan sedekah dari penghasilan kita tanpa ada transaksi penyeimbang yang tampak di depan mata boleh jadi dianggap irrasional bagi mereka yang tidak memahami esensi dan manfaat bersedekah. Seseorang yang bersedekah dengan rasional mengharapkan balasan langsung berupa timbulnya pujian, meningkatkan pamor serta reputasinya minimal ucapan terima kasih. Balasan-balasan tersebut menimbulkan kepuasan (*utility*) dalam *consumption basket*-nya dan untuk itu ia bersedia mengeluarkan tingkat sedekah tertentu plus perangkat-perangkat promosi jika diperlukan.

Rasionalitas yang sangat diagungkan dalam teori mekanisme pasar dan alokasi sumber daya telah menjauhkan analisis ekonomi moderen dari siraman nilai-nilai kemanusiaan dan semangat egaliter yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena perilaku ekonomi manusia yang rasional adalah yang didorong untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri dengan cara memaksimalkan kekayaan dan konsumsinya lewat cara apapun. Semua keinginan lain yang membawa manusia bersama-sama seperti kerjasama, saling menyayangi, persaudaraan, dan *altruisme* dikesampingkan sama sekali.¹⁰

Pola konsumsi rasional misalnya, yang lebih menekankan pada pemenuhan keinginan material dari pada aspek kebutuhan lainnya. Bahkan rasionalitas konsumen hanya dipandang dari sisi bagaimana ia memaksimalkan

⁹ Mustafa Edwin Nasution, *et al. Pengenalan ...*, hlm. 60.

¹⁰ M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2002), hlm. 20.

nilai guna dengan usaha yang paling minimal. Hal ini tentu saja menjadikan seluruh mesin produksi diarahkan secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi tujuan ini dengan mengabaikan apakah pemenuhan keinginan ini pada hakikatnya akan menimbulkan kesejahteraan manusia secara hakiki atau bukan. Akibatnya yang muncul adalah ketimpangan dalam berbagai persoalan sosioekonomi.¹¹ Untuk itu perlu menginjeksikan nilai-nilai moral dalam bidang konsumsi ini sehingga tidak membahayakan bagi keselamatan manusia itu sendiri.

C. Rasionalitas Ekonomi Islam

Rasionalitas ekonomi Islam secara umum dibangun atas dasar aksioma-aksioma yang diderifasi dari agama Islam sendiri. Sebagai agama yang universal, Islam juga memiliki banyak aksioma-aksioma. Dalam banyak hal, aksioma digali dari nilai-nilai dari suatu budaya yang bersifat universal. Namun penafsiran operasional dari nilai-nilai tersebut didasarkan kepada cara pandang dan berfikir yang ada pada budaya tersebut, seringkali juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang melingkupinya, sehingga rasional merupakan konsepsi kultural, artinya bersifat unik untuk setiap kultur.¹²

Dalam agama Islam Unsur-unsur pokok dari rasionalitas ekonomi Islam adalah sebagai berikut:¹³

¹¹ Mustafa Edwin Nasution, *et al. Pengenalan...*, hlm. 61.

¹² *Teks Book Ekonomi Islam*, hlm. 19.

¹³ Hal ini berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Monzer Kahf, *Ekonomi Islam ...*, hlm. 17-26. Dalam *Teks Book Ekonomi Islam* diungkapkan rasionalitas ekonomi Islam sebagai berikut: bahwa setiap pelaku ekonomi (1) bertujuan untuk mendapatkan masalah, (2) berusaha untuk tidak melakukan kemubaziran, (3) berusaha untuk meminimumkan resiko, (4) dihadapkan kepada situasi tidak pasti, (5) berusaha melengkapi informasi dalam upaya meminimumkan resiko. hlm. 19-21.

1. Konsep Keberhasilan

Konsep Keberhasilan dalam Islam senantiasa dikaitkan dengan nilai-nilai moral. Dr. Siddiqi sudah mengembangkan konsep ini lebih jauh ia mengatakan.

Keberhasilan terletak dalam kebaikan. Dengan perilaku manusia yang semakin sesuai dengan pembakuan-pembakuan moral dan semakin tinggi kebaikannya, maka dia semakin berhasil.

... Selama hidupnya, pada setiap fase keberadaan, pada setiap langkah, individu muslim berusaha berbuat selaras dengan nilai-nilai moral.

... Moralitas dan spiritualitas tidak menuntut pengusaha untuk mengabaikan ambisi-ambisinya dan berhenti untuk mendapatkan sesuatu yang sederhana; tetapi sebaliknya ia justru menekankan dan mendorong ambisi-ambisinya itu dengan mengajaknya untuk mendirikan perusahaan, di samping memenuhi ambisi-ambisinya sendiri secara baik dalam kaitannya dengan kehidupan dan kenikmatan-kenikmatannya, sebagai sarana untuk melayani umat manusia. Jadi pernyataan bahwa kebaikan atau kesalehanlah yang seharusnya menjadi pusat perhatian kita bahkan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi, tidak dapat diartikan sebagai asketisme atau penafian terhadap tujuan-tujuan ekonomi.¹⁴

Dengan demikian keberhasilan atau kemajuan dalam ekonomi (membuat uang) bukanlah suatu kejahatan menurut pandangan Islam. Bahkan menjadi salah satu kebaikan bila dapat diseimbangkan dan diniatkan untuk mendapatkan kebaikan.

2. Skala Waktu Perilaku Konsumen

Islam mengaitkan kepercayaan terhadap adanya

¹⁴ Dr. Muhammad Nejatullah Siddiqi dalam Monzer Kahf, *Ekonomi Islam*, hlm 18-20.

Hari Kiamat dan kehidupan di akhirat secara ketat dengan kepercayaan terhadap adanya Allah. Hal ini memperluas cakrawala setiap muslim mengenai waktu setelah terlampainya kematian.

Adanya hari kiamat dan kehidupan di akhirat membuat seorang konsumen harus memaksimalkan waktu yang dimiliki dengan berbuat yang terbaik untuk kehidupan dunia, tetapi dengan itu seorang konsumen juga memiliki pondasi yang kokoh untuk kehidupan akhirat.

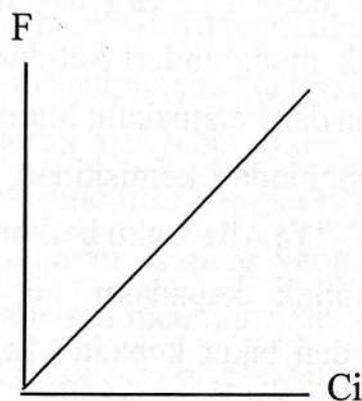
Islam mengaitkan kepercayaan terhadap adanya hari kiamat dan kehidupan di akhirat secara ketat dengan kepercayaan terhadap adanya Allah. Hal ini memperluas cakrawala setiap Muslim mengenai waktu setelah terlampainya kematian dimana setiap orang menerima kalkulasi pahala dan dosa akibat perilakunya di dunia. Kehidupan sebelum kematian dan kehidupan sesudah kematian terkait satu sama lain dengan erat sekali dalam urutannya. Hal ini memiliki efek sejauh menyangkut perilaku konsumen.

Pertama, pilihan jenis konsumsi akan diorientasikan pada dua bagian yaitu yang langsung dikonsumsi untuk kepentingan dunia dan untuk kepentingan akhirat. *Kedua*, jumlah dan jenis pilihan konsumsi kemungkinan menjadi lebih banyak, karena mencakup jenis konsumsi untuk kepentingan akhirat.

Pahala seseorang di akhirat tergantung pada perilaku konsumsi sewaktu di dunia. Pahala ini akan berujud sarana dan fasilitas bagi pemenuhan kepuasan dan kebutuhan manusia yang sifat, kuantitas dan kualitasnya jauh melebihi dunia. Oleh karenanya konsumsi untuk

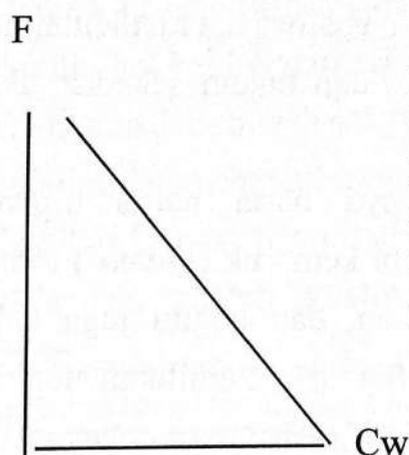
ibadah pada hakekatnya adalah konsumsi untuk masa depan sementara konsumsi duniawi adalah konsumsi untuk masa sekarang (*present consumption*). Semakin besar konsumsi untuk ibadah semakin tinggi pula pahala yang akan dicapai demikian pula sebaliknya. Hubungan antara pahala (*reward*) dengan kedua jenis konsumsi ini dapat secara grafis sebagaimana dalam gambar di bawah ini:¹⁵

a. Hubungan antara pahala dan konsumsi ibadah



* terdapat hubungan positif, semakin tinggi tujuan *falah* (F) yang ingin dicapai semakin dituntut untuk memperbesar konsumsi kebutuhan ibadah (C_i)

b. Hubungan antara pahala dengan konsumsi untuk kebutuhan duniawi (*worldly consumption*)



* Terdapat hubungan negatif; semakin tinggi tujuan *falah* (F) yang ingin dicapai, semakin dituntut untuk mengurangi konsumsi kebutuhan duniawi (C_w).

3. Konsep Harta dan Kepemilikan

15 M. Anas Zarqa, "A Partial Relationship in a Muslim's utility Function," dalam Sayyid Tahir, dkk. (ed.), *Reading in Microeconomics; An Islamic Perspective* (Longman, Malaysia, 1992), hlm . 106.

Islam menganggap harta sebagai anugerah dari Allah. Islam tidak membenarkan adanya kemiskinan, hal ini didasarkan kepada sebuah hadis:

كاد الفقر أن يكون كفرا

Artinya: “Kemiskinan hampir-hampir mendekatkan orang kepada pengingkaran terhadap Islam”

Juga Nabi biasa berdoa: “Ya Allah lindungilah dan tolonglah aku untuk menghindari ketidakmampuan dan kemalasan, ketakutan dan ketamakan; lindungilah dan tolonglah aku untuk menghindari kemiskinan, kekufuran dan perilaku yang salah.” “Ya Allah, aku berharap kiranya Engkau memberi petunjuk kepadaku ke Jalan-Mu, memberikan rasa cinta dan takut kepada-Mu, membuat saya puas dengan apa yang Engkau berikan kepadaku, dan berikanlah kepadaku kecukupan.” As-Siba’i mengomentari hadis di atas, terutama terhadap bagian terakhir do’a Rasulullah bahwa hal itu menunjukkan sikap positif terhadap harta dan bukan sekedar sikap negatif terhadap kemiskinan.¹⁶

Pada prinsipnya harta harus diperoleh oleh seorang muslim, tetapi kemaruk (*thama’*) terhadap harta adalah suatu kejahatan, dan begitu juga kebalikannya yaitu pemborosan (*isyraf*). Pemilikan terhadap harta adalah pemilikan relatif, sebatas merekayasa dan dalam memperolehnya manusia hanya berusaha dan Allah SWT yang menentukan jumlah dan hasil yang diraihnya. Harta

16 Mustafa as-Siba’i melalui Monzer Kahf, *Ekonomi Islam...*, hlm 23.

bagi manusia dalam pandangan Islam adalah sebagai ujian keimanan, sebagai bekal ibadah, sebagai amanah (titipan, *as atrust*) dari Allah, dan sebagai perhiasan hidup.¹⁷ Bahkan milik yang sebenarnya yang dimiliki manusia adalah apa yang sudah dibelanjakannya, berdasarkan sebuah hadis: “Harta kamu adalah apa yang kamu pergunakan dan harta ahli warismu adalah apa yang tidak kamu pergunakan.”

Barang-barang konsumen dalam konsep Islam adalah bahan-bahan konsumsi yang berguna dan baik, yang manfaatnya menimbulkan perbaikan secara material, moral maupun spiritual pada konsumennya. Ini dikarenakan Al-Quran menyebut untuk barang-barang berbagai produk dan komoditas dengan istilah *at-thayyibah* dan *ar-rizq*.¹⁸ Jadi barang-barang yang tidak memiliki kebaikan dan membantu meningkatkan manusia tidak dianggap barang dan tidak bisa dikatakan sebagai aset umat Islam.

D. Dasar-Dasar Rasionalitas Ekonomi Islam

Filosofi atau prinsip-prinsip umum ekonomi Islam, terdiri dari sekumpulan kaidah dan prinsip umum yang terkandung dalam Al-Quran dan sunnah nabawiyah, juga dalam hasil-hasil ijtihad ulama dalam bentuk qiyas dan ijma' serta semangat merealisasikan kemaslahatan dalam *al-maqashid asy-syari'ah*.

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam

¹⁷ Tajuddin Pogo “Pemikiran Ekonomi Islam Rahmatan lil ‘Alamin” dalam Ahmad Satori Ismail (et. al), *Islam Moderat Menebar Islam Rahmatan lil ‘Alamin*, (Jakarta: Ikadi, 2007), hlm. 292.

¹⁸ Istilah *at-thayyibah* berarti “barang-barang yang baik”, “barang-barang yang suci”, sementara *ar-rizq dan turunannya* diartikan “makanan dari Tuhan”, “pemberian Tuhan”, “pemberian dari langit,” maksudnya adalah Allah pamasok kebutuhan semua makhluk. Dalam Monzer Kahf, *Ekonomi Islam...*, hlm 26.

memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah Allah untuk dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama seluruh manusia dan makhluk di bumi. Manusia dibekali dengan syari'ah yang dibawa oleh para rasul sebagai pedoman lengkap dalam menjalani tugas khalifah. Syari'ah Islam yang dibawa oleh rasul terakhir mempunyai keunikan tersendiri. Di samping komprehensif-menyeluruh cakupannya-, (*syamil mutakamil*), syari'ah ini juga bersifat universal (*alamiyah*).

Komprehensif berarti syari'ah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (*ibadah*) maupun sosial (*mu'amalah*). Ibadah berfungsi untuk menjaga hubungan keharmonisan antara manusia dengan Khalik, Allah SWT. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinyu tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi aturan main (*rules of the game*) antar manusia dalam berkehidupan sosial secara menyeluruh baik urusan-urusan privat maupun urusan-urusan publik.

Universal bermakna syari'ah Islam dapat diterapkan di setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama dalam bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan luwes (*flexible*), muamalah tidak membedakan perlakuan terhadap muslim dan nonmuslim.

Ekonomi Islam mempunyai sifat dasar sebagai ekonomi *Rabbany* dan *insany*. Disebut ekonomi rabbany karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai ilahiyah. Lalu dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi insani karena system ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk

kemakmuran manusia.

Umer Chapra menyebutnya dengan Ekonomi Tauhid. Cerminan watak “ketuhanan” ekonomi Islam bukan pada aspek pelaku ekonominya- sebab pelakunya pasti manusia- tetapi pada aspek aturan yang harus dipedomani oleh para pelaku ekonomi. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa semua faktor ekonomi termasuk diri manusia pada dasarnya adalah kepunyaan Allah, dan kepada-Nya (kepada aturan-Nya) dikembalikan segala urusan (3:109). Melalui aktivitas ekonomi, manusia dapat mengumpulkan nafkah sebanyak mungkin, tetapi tetap dalam koridor aturan main. “... *Dialah yang memberi kelapangan atau membatasi rezeki orang yang Dia kehendaki*” (42:12; 13:26).

Keimanan memegang peranan penting dalam ekonomi Islam, karena secara langsung akan mempengaruhi cara pandang dalam membentuk kepribadian, perilaku, gaya hidup, selera, dan preferensi manusia, sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya dan lingkungan. Menurut Chapra,¹⁹ cara pandang ini akan sangat mempengaruhi sifat, kuantitas, dan kualitas kebutuhan materi maupun kebutuhan psikologis dan metode pemenuhannya. Keyakinan demikian juga akan senantiasa meningkatkan keseimbangan antara dorongan materil dan spirituail, meningkatkan solidaritas keluarga dan sosial, dan mencegah berkembangnya kondisi yang tidak memiliki standar moral. Keimanan akan memberikan saringan moral yang memberikan arti dan tujuan pada penggunaan sumber daya, dan juga memotivasi mekanisme yang diperlukan bagi operasi yang efektif. Saringan moral

¹⁹ M. Umer Chapra dalam *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, edisi terjemahan, Jakarta: SEBI Institute, 2001, melalui Mustafa Edwin Nasution, *et al. Pengenalan...*, hlm. 13.

bertujuan menjaga kepentingan diri tetap berada dalam batas-batas kepentingan sosial dengan mengubah preferensi individual sesuai dengan prioritas sosial dan menghilangkan atau meminimalisasi penggunaan sumber daya untuk tujuan yang akan menggagalkan visi sosial tersebut. Ini akan bias membantu meningkatkan keserasian antara kepentingan diri dan kepentingan sosial.

Nilai-nilai keimanan inilah yang kemudian menjadi aturan yang mengikat. Dengan mengacu kepada aturan ilahiah, setiap perbuatan manusia mempunyai nilai moral dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak boleh lepas dari nilai; secara vertikal merefleksikan moral yang baik dan secara horizontal memberi manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya. Dalam ekonomi Islam, sumber daya insani menjadi sangat penting, manusia menjadi pusat sirkulasi manfaat ekonomi dari berbagai sumber daya yang ada. (14:32-34).

Demikianlah prinsip dasar sistem ekonomi Islam yang mendasari rasionalitas ekonomi Islam, suatu sistem yang bersifat Ilahiah-insaniyah, bersifat terbuka tapi sekaligus selektif. Sistem ekonomi Islam juga mengenal toleransi tetapi tidak mengenal kompromi dalam menegakkan keadilan.

E. Asumsi yang Berkembang Dalam Rasionalitas Ekonomi Islam

Setelah dipaparkan prinsip dasar dari ekonomi Islam, berikut dipaparkan beberapa asumsi yang berkembang dalam rasionalitas ekonomi Islam, yang kadang sering disebut dengan karakteristik ekonomi Islam. Rasionalitas ini berkembang sesuai dengan perkembangan kajian ekonomi

Islam, yang sudah banyak dilakukan oleh ahli-ahli ekonomi Islam yang mempunyai latar belakang fiqih yang kuat²⁰, juga banyak dibukanya kajian-kajian pemikiran ekonomi terhadap tokoh-tokoh Islam klasik²¹ yang dilakukan oleh pemerhati ekonomi Islam saat ini. Banyak pendapat yang memberikan karakteristik ekonomi Islam ini²², tetapi dapat diuraikan di sini, sekaligus untuk membedakan dengan ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis, minimal ada empat karakteristik berikut:²³

a. Dialektika Nilai-Nilai Spiritualisme dan Materialisme

20 Seperti M. Umer Chapra seorang ekonom profesional, dia pernah meraih penghargaan terhormat dari IDB (*Islamic Development Award*) di bidang ekonomi Islam, dan juga King Faisal International Prize untuk kajian Islam. Chapra seorang ekonom Islam yang berlatar belakang pengetahuan ke-Islaman yang lumayan kuat. Tokoh lain adalah Muhammad Anas Zarqa, putra dari Mustafa Ahmad Zarqa. Sudah banyak karya dalam bidang ekonomi Islam yang dilahirkan oleh Anas Zarqa baik dalam bahasa Arab ataupun dalam edisi Inggris, seperti *Al-Islam wa at-Tahadi al-Iqtishadi, Methodology of Islamic Economics*. Dasar pengetahuan hukum Islam banyak diperoleh dari ayahnya yang seorang ahli hukum Islam. Pengetahuan dasar-dasar inilah yang menambuh keluasan keilmuan ekonomi Islam. Dalam Jimmi Qizwini, *Perilaku Konsumen Rasional dalam Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran Muhammad Anas Zarqa)*, skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijga, 2006.

21 Banyak pemikiran tokoh-tokoh Islam diungkap seperti Al Ghazali, Ibn Hazm, Ibn Taimiyah, dll. Dalam Abul Hasan M. Sadeq, dkk., *Reading in Islamic Ecomic Thought*, (Longman, Malaysia, 1992).

22 Dalam *Mausu'ah al-Ilmiyah wa al-Amaliyah al-Islamiyah* yang dikutipkan oleh Edwin Nasution, mengatakan ada 10 karakter ekonomi Islam; (1) Harta kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta (2) Ekonomi terikat dengan akidah, syari'ah (hukum), dan moral (3) Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan (4) Ekonomi Islam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum (5) Kebebasan individu dijamin dalam Islam (6) Negara diberi wewenang turut campur dalam prekonomian (7) Bimbingan konsumsi (8) Petunjuk investasi (9) Zakat (10) Larangan riba. Dalam *Pengenalan Ekklusif Ekonomi Islam*, h. 18-29. Sementara Tajuddin Pogo dalam tulisannya "Pemikiran Ekonomi Islam Rahmatan lil 'Alamin" menyimpulkan ada 5 karakter (1) Ekonomi Rabbany/tauhid (divine economic), (2) Ekonomi moral/sarat nilai (moral/value loaded economic), (3) ekonomi insani atau khilafah (humane economic), (4) ekonomi wasathan (moderate economic), (5) ekonomi koperatif dan keadilan (cooperative & justice economic), dalam Ahcmad Satori Ismail (et. al), *Islam Moderat Menebar Islam Rahmatan lil 'Alamin*, (Jakarta: Ikadi, 2007) h. 287-290.

23 Diambilkan dari pendapat Said Saad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 27-33.

Sistem ekonomi sekarang hanya peduli terhadap peningkatan utilitas dan nilai-nilai materialisme suatu barang tanpa menyentuh nilai-nilai spiritulisme dan etika kehidupan masyarakat. Sistem kapitalisme memisahkan intervensi agama dari berbagai kegiatan dan kebijakan ekonomi, padahal pelaku ekonomi merupakan penggerak utama bagi perkembangan peradaban dan perekonomian masyarakat. Dalam ekonomi Islam terdapat dialektika antara nilai-nilai spiritulisme dan materialisme. Pelbagai kegiatan ekonomi, khususnya transaksi harus berdasarkan keseimbangan dari kedua nilai tersebut.

b. Kebebasan Berekonomi

Dalam kerangka merealisasikan konsep kebebasan individu pada kegiatan ekonomi, kapitalisme menekankan prinsip persamaan bagi setiap individu masyarakat dalam kegiatan ekonomi secara bebas untuk meraih kekayaan. Realitanya konsep kebebasan tersebut menimbulkan kerancuan bagi proses distribusi pendapatan dan kekayaan. Selain itu sistem tersebut secara otomatis mengklasifikasikan masyarakat menjadi dua bagian, yaitu pemilik modal dan para pekerja.

Sementara dalam konsep sosialisme masyarakat tidak mempunyai kebebasan sedikitpun dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kepemilikan individu dihilangkan dan tidak ada kebebasan untuk melakukan transaksi dalam kesepakatan perdagangan.

Ekonomi Islam tidak menafikan intervensi pemerintah. Kebijakan pemerintah merupakan sebuah keniscayaan ketika perekonomian dalam kondisi darurat, selama hal itu dibenarkan secara *syara'*. Pada sisi lain

kepemilikan dan kebebasan individu dibenarkan sepanjang tetap pada koridor syari'ah, Kebebasan tersebut akan mendorong masyarakat untuk beramal dan berproduksi demi tercapainya kemaslahatan hidup bermasyarakat.

c. Dualisme Kepemilikan

Hakikatnya, pemilik alam semesta beserta isinya adalah Allah SWT. Manusia hanya wakil Allah dalam rangka memakmurkan dan mensejahterakan bumi. Kepemilikan manusia merupakan derivasi kepemilikan Allah yang hakiki. Untuk itu, setiap langkah dan kebijakan ekonomi yang diambil oleh manusia untuk memakmurkan alam semesta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang digariskan oleh Allah SWT. yang Maha Memiliki.

Konsep keseimbangan merupakan karakteristik dasar ekonomi Islam, karena Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan imbang. Salah satu wujud keseimbangan kepemilikan manusia adalah adanya kepemilikan publik sebagai penyeimbang kepemilikan individu. Kepemilikan publik merupakan kepemilikan yang secara *ashal* telah ditentukan oleh syari'ah. Asas dan pijakan kepemilikan publik adalah kemaslahatan bersama. Segala komoditas dan jasa yang dapat menciptakan ataupun menjaga keseimbangan dan kemaslahatan bersama merupakan barang publik yang tidak boleh dimiliki secara individu (*publik goods*). Kepemilikan barang publik dapat didelegasikan ke pemerintah ataupun instansi lain yang mempunyai nilai-nilai amanah dan tanggung jawab, yang dapat dibenarkan oleh syari'ah.

Berkenan dengan kepemilikan public Rasulullah pernah mengindikasikan dalam sebuah hadis, “ Manusia

bersekutu dalam tiga hal yaitu: air, rumput, dan api”. Penuturan Rasul atas ketiga komoditas tersebut bukan berarti *public goods* hanya dibatasi oleh komoditas tersebut. Akan tetapi makna hadis tersebut dikontekstualisasikan sesuai dengan perkembangan zaman, dan tempat.

d. Menjaga Kemaslahatan Individu dan Bersama

Kemaslahatan individu tidak boleh dikorbankan demi kemaslahatan bersama atau sebaliknya. Untuk mengatur dan menjaga kemaslahatan masyarakat diperlukan sebuah instansi yang mendukung. Al-Hisbah merupakan instansi keuangan dalam pemerintahan Islam yang berfungsi sebagai pengawas atas segala kegiatan ekonomi. Lembaga tersebut bertugas untuk mengawasi semua infrastruktur yang terlibat dalam mekanisme pasar. Selain itu Al-Hisbah mempunyai wewenang untuk mengatur tata letak kegiatan ekonomi, juga diwajibkan untuk menyediakan semua fasilitas kegiatan ekonomi demi terciptanya kemaslahatan bersama.

e. Maksimisasi Perencanaan

Maksimisasi dalam agama Islam tidaklah menjadi persoalan, ketika hal itu untuk kebaikan, yakni “kapan saja sesuatu itu dinyatakan baik maka orang seharusnya melakukannya sebanyak yang dia dapat”. Hal ini didasari pada tidak adanya pembatasan dalam hal melakukan sedekah, untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat dan menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Konsep berlebih-lebihan dalam belanja dalam hal sedekah tidak berlaku, karena pahala akhirat itulah yang paling besar.

F. Rasionalitas Islam Dalam Perilaku Konsumen

a. Perilaku Konsumen Rasional (Konvensional)

Perilaku konsumen didefinisikan sebagai studi tentang unit pembelian (*buying unit*) dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan, jasa, pengalaman, serta ide-ide. Definisi tentang perilaku konsumen juga menyatakan bahwa proses pertukaran melibatkan serangkaian langkah-langkah, dimulai dengan tahap perolehan atau akuisisi (*acquisition phase*), lalu ke tahap konsumsi (*consumption phase*), dan berakhir dengan tahap disposisi (*disposition phase*) produk dan jasa.²⁴

Perilaku konsumen pada hakekatnya untuk memahami “*why do consumers do what they do*”. Perilaku konsumen adalah semua jenis kegiatan, tindakan serta proses psikologis yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa. Teori Perilaku konsumen (*consumer behavior*) mempelajari bagaimana manusia memilih di antara berbagai pilihan yang dihadapinya dengan memanfaatkan sumber daya (*resources*) yang dimilikinya.

Teori perilaku konsumen rasional dalam paradigma ekonomi konvensional didasari pada prinsip-prinsip dasar *utilitarianisme* dan rasionalisme ekonomik. Diprakarsai oleh Bentham yang mengatakan bahwa secara umum tidak seorangpun dapat mengetahui apa yang baik untuk kepentingan dirinya kecuali orang itu sendiri. Inilah dasar *individulaisme*, dengan demikian pembatasan terhadap kebebasan individu, baik oleh individu lain maupun oleh penguasa, adalah kejahatan dan harus ada alasan kuat

²⁴ John C. Mowen, *Perilaku Konsumen*, alih bahasa Lina Salim, cet. ke-5 (Jakarta: Erlangga, 2002), I:6.

untuk melakukannya.²⁵ Campur tangan negara di dalam masyarakat manapun harus diusahakan seminimum mungkin dan campur tangan yang merintangai kemajuan manusia merupakan campur tangan terhadap kebebasan-kebebasan dasar manusia, dan karena itu harus dihentikan.

Lebih jauh dikatakan bahwa setiap orang di dalam masyarakat harus bebas untuk mengejar kepentingannya dengan cara yang dipilihnya sendiri, namun kebebasan seseorang untuk bertindak itu juga dibatasi oleh kebebasan orang lain; artinya kebebasan untuk bertindak itu tidak boleh mendatangkan kerugian bagi orang lain.

Dasar filosofis tersebut melatarbelakangi analisis mengenai perilaku konsumen dalam teori ekonomi konvensional, dan begitulah yang dianggap rasional, sehingga tujuan aktivitas konsumsi yang rasional adalah memaksimalkan kepuasan (*utility*) dari mengkonsumsi sekumpulan barang/jasa yang disebut *consumtion bundle* dengan memanfaatkan seluruh anggaran/pendapatan yang dimiliki.²⁶

Akibat dari rasionalitas konsumsi yang lebih mendukung individualisme dan *self interest*, maka keseimbangan umum tidak dapat dicapai. Yang terjadi adalah munculnya ketimpangan dalam berbagai persoalan sosioekonomi. Demi pemenuhan kepuasan seseorang terkadang mengorbankan banyak kepentingan yang lain, tetapi hal itu dianggap sah dan wajar.

b. Perilaku Konsumen Islam Rasional

Islam menginginkan manusia mencapai dan

²⁵ Dikutip melalui Mustafa Edwin Nasution, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 57.

²⁶ *Ibid.* hlm. 58.

memelihara kesejahteraannya, Imam Syatibi menggunakan istilah '*maslahah*'²⁷ yang maknanya lebih luas dari sekedar *utility* atau kepuasan dalam terminologi ekonomi konvensional. Maslahah merupakan tujuan hukum syara' yang paling utama dan itulah tujuan konsumen yang sesuai dengan rasionalitas Islam.

Menurut Syatibi, Maslahah adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dari kehidupan manusia di muka bumi ini. Ada lima tujuan dasar menurut beliau, yakni keyakinan (*al-Din*), kehidupan atau jiwa (*al-nafs*), intelektual (*al-Aql*), properti atau harta benda (*al-mal*), dan keluarga atau keturunan (*al-nasl*).²⁸ Semua barang dan jasa yang mendukung tercapainya dan terpeliharanya kelima elemen tersebut di atas pada setiap individu, itulah yang disebut masalah.

Kegiatan-kegiatan ekonomi meliputi produksi, konsumsi, dan pertukaran yang menyangkut masalah tersebut harus dikerjakan sebagai suatu '*religious duty*' atau ibadah. Tujuannya bukan hanya kepuasan di dunia tapi juga kesejahteraan di akhirat. Semua aktivitas tersebut, yang memiliki masalah bagi umat manusia, disebut '*need*' atau kebutuhan. Dan semua kebutuhan ini harus dipenuhi.

Memenuhi kebutuhan dan bukan memenuhi kepuasan/keinginan-adalah tujuan dari aktifitas ekonomi Islami, dan usaha pencapaian tujuan itu adalah salah satu kewajiban dalam beragama. Adapun sifat-sifat masalah sebagai berikut:

²⁷ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Kairo: Mathba'ah as-Syarq al-Adnaa, t.th.) Jilid II, hlm. 4.

²⁸ *Ibid.*, hlm 5.

- a. Masalah bersifat subjektif dalam arti bahwa setiap individu menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan masalah atau bukan bagi dirinya. Namun berbeda dengan konsep *utility*, kriteria masalah telah ditetapkan oleh syariat dan sifatnya mengikat bagi semua individu. Misalnya, bagi seseorang mempertimbangkan bunga bank memberi masalah bagi dirinya atau usahanya, namun syari'ah telah menetapkan keharaman bunga bank, maka penilaian individu tersebut menjadi gugur.
- b. *Maslahah* orang per orang akan konsisten dengan *masalah* orang banyak. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep *Pareto Optimum*, yaitu keadaan optimal di mana seseorang tidak dapat meningkatkan tingkat kepuasan atau kesejahteraan tanpa menyebabkan penurunan kepuasan atau kesejahteraan orang lain.

Berdasarkan tujuannya masalah dapat dibedakan menjadi dua jenis: pertama, *masalah* terhadap elemen-elemen yang menyangkut kehidupan dunia dan akhirat, dan kedua: *masalah* terhadap elemen-elemen yang menyangkut hanya kehidupan akhirat.

Dalam konsumsi, individu muslim akan memiliki dua pilihan, pertama bagian pendapatannya yang akan dialokasikan untuk masalah jenis pertama dan berapa untuk masalah jenis kedua.. Kedua bagaimana memilih di dalam masalah jenis pertama: berapa bagian pendapatannya yang akan dialokasikan untuk memenuhi kehidupan dunia (dalam rangka mencapai "kepuasan" di akhirat) dan berapa bagian untuk kebutuhan akhirat.

Pada tingkat tertentu, konsumen Islam, karena

memiliki alokasi untuk hal-hal yang menyangkut akhirat, akan mengkonsumsi barang lebih sedikit daripada non muslim. Hal yang membatasinya adalah konsep masalah tersebut di atas. Tidak semua barang/jasa yang memberikan kepuasan/utility mengandung masalah di dalamnya, sehingga tidak semua barang dan jasa dapat dan layak dikonsumsi oleh umat Islam.

Dalam membandingkan konsep kepuasan dengan pemenuhan kebutuhan (yang terkandung di dalamnya masalah), kita perlu membandingkan tingkatan-tingkatan dalam tujuan hukum syara' yakni antarad *daruriyah* (primer), *hajiyah* (sekunder) ,dan *tahsiniyyah* (komplementer). Kebutuhan *daruriyyah* adalah pemenuhan kebutuhan essensial bagi kehidupan manusia yaitu agama, jiwa, akal , harta, dan keluarga atau keturunan. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini akan berakibat terancamnya eksistensi kelima hal tersebut. Kebutuhan *hajiyat* adalah kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya, tidak terpenuhinya kebutuhan ini hanya akan menimbulkan kesulitan, kelompok ini erat kaitannya dengan keringanan atau *rukhsah* (dispensasi) dalam bahasa fiqih Islam. Adapun kebutuhan dalam kelompok *tahsiniyyah* adalah kebutuhan yang akan meningkatkan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhan sesuai dengan kepatutan. Kebutuhan ketiga ini erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etiket sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam eksistensi lima tujuan agama, sehingga sering disebut sebagai komplementer.²⁹

Islam juga memberikan arahan yang sangat indah

²⁹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 126-127.

dengan memperkenalkan konsep *israf* (berlebih-lebihan) dalam membelanjakan harta dan *tabzir* (mubazir). Islam memperingatkan agen ekonomi agar jangan sampai terlena dalam berlomba-lomba mencari harta (*at-takaatur*). Islam membentuk jiwa dan pribadi yang beriman, bertakwa, bersyukur, dan menerima.

Untuk mencegah agar tidak terlanjur ke gaya hidup mewah, Islam mengharamkan segala pembelanjaan yang tidak mendatangkan manfaat, baik manfaat materiil maupun manfaat spirituil. Apalagi melakukan pembelanjaan untuk barang-barang yang bukan hanya tidak bermanfaat tetapi juga dibenci Allah, seperti alkohol, narkoba, dan barang-barang haram lainnya. Namun bukan berarti menjadi kikir, Islam mengajarkan sikap pertengahan dalam mengeluarkan harta, tidak berlebihan dan tidak pula kikir. (Al-Furqan: 67).

Anas Zarqa berpandangan perilaku konsumen yang sesuai dengan rasionalitas Islam adalah sebagai berikut:

- a. Seorang konsumen yang rasional harus berperilaku untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dalam artian seorang konsumen muslim bertindak rasional apabila memaksimalkan nilai gunanya sebagai salah satu dari unit konsumen dan pada saat yang bersamaan memenuhi kewajibannya sebagai umat Islam untuk menyisihkan sumber daya yang dimilikinya untuk kepentingan di jalan Allah (*fi sabilillah*).
- b. Dalam melakukan kegiatan konsumsi seorang konsumen Islam harus menentukan skala prioritas berdasarkan jenis barang yang akan dikonsumsi (*Necessities, conveniences, refinements/ dharuriyyah, hajiyah, tahsiniyah*). Semua

ini ditujukan untuk mendapatkan nilai masalah yang lebih tinggi.

- c. Pencapaian maksimum nilai guna barang yang dikonsumsi tidak hanya mempertimbangkan barang-barang yang dikonsumsi saat ini dan langsung dirasakan, tetapi juga mempertimbangkan konsumsi barang-barang yang dapat dirasakan manfaatnya saat ini maupun setelah meninggal dunia.
- d. Kegiatan investasi dan menabung adalah salah satu sikap yang rasional dari pelaku konsumen muslim yang dapat membawa nilai tambah pada kehidupan di dunia dan di akhirat.
- e. Keyakinan akan hari akhir akan mempengaruhi jumlah belanja seorang konsumen muslim dalam konsumsi untuk kehidupan dunia, karena juga mempertimbangkan konsumsi untuk ibadah.
- f. Setiap konsumen muslim harus belanja sesuai bekal yang sudah diamanahkan kepadanya. Yang terpenting adalah bagaimana konsumen mempertanggungjawabkan bekal yang sudah dititipkan kepadanya.³⁰

Jadi konsumen muslim yang rasional akan komitmen dengan kaidah-kaidah dan hukum-hukum yang disampaikan dalam syari'at untuk mengatur konsumsi agar mencapai kemanfaatan konsumsi seoptimal mungkin, dan mencegah penyelewengan dari jalan kebenaran dan dampak mudharatnya, baik bagi konsumen sendiri maupun yang lainnya.³¹

³⁰ Jimmi Qizwini, *Perilaku Konsumen Rasional dalam Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran Muhammad Anas Zarqa)*, skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijga, 2006. hlm. 50-52.

³¹ Berkaitan dengan kaidah-kaidah konsumsi seorang muslim dan sangsi-sangsi pelarangannya diuraikan panjang dalam Dr. Jaribah bin Ahmad

G. Kesimpulan

Asumsi-asumsi yang mendasari ekonomi konvensional berkembang berdasarkan filosofi yang jauh berbeda dengan filosofi ekonomi Islam. Perbedaan konsep dasar antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional seharusnya menjadikan ekonomi Islam sebagai ilmu tersendiri yang berbeda dengan ekonomi konvensional.

Rasionalitas dalam ekonomi konvensional belum tentu dianggap sesuai dengan rasionalitas ekonomi Islam. Rasionalitas ekonomi Islam dibangun atas dasar aksioma-aksioma yang diderifasikan dari agama Islam yang bersifat universal, yang bermuara kepada lima tujuan dasar yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keluarga atau keturunan yang disebut dengan masalah.

Sekalipun secara dasar rasionalitas ekonomi Islam ini akan tetap sama selamanya, tetapi dalam tahap penafsiran operasionalnya rasionalitas inipun akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat Islam dan budaya masyarakat Islam, sehingga kajian yang berperiodik tentang hal ini mesti selalu dilakukan.

H. Daftar Bibliografi

- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, alih bahasa Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Khalifa, 2010.
- Al-Ghazali, Al-Imam Abi Hamid bin Muhammad, *Ihya' u 'Ulumi ad-Dini*, Kairo: Muassasah al Halabi, 1968.
- Aqil, Syed Omar Syed, "Rationality in Economic Theory: A Critical Appraisal" dalam Sayyid Tahir dkk. (ed.), *Reading in Micro Economics: An Islamic Perspective*,

al Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, alih bahasa Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Khalifa, 2010), hlm. 141-203.

- Longman, Malaysia, 1992.
- Chapra, M. Umer, *Sistem Moneter Islam*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri dari *Toward a Just Monetary System*, Jakarta: Gema Insani Pres, 2002.
- Chapra, M. Umer, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri dari *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Jakarta: Gema Insani Pres, 2002.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hanafi, Syafiq Mahamadah, "Prinsip Ekonomi Islam: Tinjauan Terhadap Keberhasilan dalam Perekonomian" dalam *Mazhab Yogya Ke-2; Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2006.
- Ismail, Ahcmad Satori (et. al), *Islam Moderat Menebar Islam Rahmatan lil 'Alamin*, Jakarta: Ikadi, 2007.
- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, cet. ke-1, alih bahasa Mahnun Husein, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Marthon, Said Saad, *Ekonomi Islam diTengah Krisis Global*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Mowen, John C., *Perilaku Konsumen*, alih bahasa Lina Salim, cet. ke-5, Jakarta: Erlangga, 2002, I:6.
- Myers, Milton L., *The Soul of Modern Economic Man: Ideas of Self Interest, Thomas Hobes to Adam Smith*, (1983).
- Nasution, Mustafa Edwin, *et al. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Qizwini, Jimmi, "Perilaku Konsumen Rasional dalam Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran Muhammad Anas Zarqa)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijga, 2006.
- Sadeq, Abul Hasan M., (dkk.), *Reading in Islamic Ecomic Thought*, Longman, Malaysia, 1992.
- Siba'i, Mustafa as-, *Isytirakiyyatul Islam*, edisi ke-2, Dimasyqa: Darul Mathbu'atul 'Arabiyyah, 1960.
- Syatibi, al-Andalusi, Abi Ishaq Ibrahim bin Musa al-

- Lakhami, *Al-Muwaafaqaat Fi Ushuuli als-Syari'ah*, Kairo: Mathba'ah as-Syarq al-Adnaa, t.t.
- Tafsir, Ahmad, *Filsafat Umum: Akal dan Hati Sejak Thales sampai James*, cet ke-7, Bandung: Rosda Karya, 1999.
- Teks Book Ekonomi Islam. Direktorat Perbankan Syari'ah (DPbS) Bank Indonesia dan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi (P3EI-UII) Universitas Islam Indonesia, 2007.
- Zarqa, M. Anas "A Partial Relationship in a Muslim's utility Function," dalam Sayyid Tahir, dkk. (ed.), *Reading in Microeconomics; An Islamic Perspective*, Longman, Malaysia, 1992.